



UWM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Kampus Berbasis Budaya

Sejarah Kesultanan Yogyakarta

Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

- *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat)* adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940 (*Staatsblad* 1941, No. 47). Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman) diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti, pendiri Kesultanan Yogyakarta yakni Pangeran Mangkubumi resmi diangkat sebagai Sultan bergelar Hamengkubuwana I. Usaha-usaha untuk meredam peperangan yang terjadi di Jawa saat itu berakhir dengan perjanjian damai di Giyanti yang kemudian dikenal oleh rakyat Jawa sebagai bentuk *Palihan Nagari* (pembagian negara), atau dikenal juga sebagai Perang Takhta Jawa.

Perjanjian Giyanti

- Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) antara Pangeran Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur-Jendral Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Pakubuwana III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama baru Kesunanan Surakarta dan daerah pesisir tetap dikuasai VOC.

- Sultan Hamengkubuwana I kemudian segera membuat ibu kota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka daerah baru (jawa: babat alas) di Hutan Paberiringan yang terletak antara aliran Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibu kota berikut istananya tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Iansekap utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan antara sultan yang sedang bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa "*ingkang jumeneng kaping...ing Ngayogyakarta Hadiningrat*" (bahasa Indonesia: "yang bertakhta ke di Yogyakarta"). Selain itu ada beberapa nama khusus atau gelar bagi Sultan, antara lain Sultan Sepuh (Sultan yang Sepuh/Tua) untuk Hamengkubuwana II, Sultan Mangkubumi (Sultan Mangkubumi) untuk Sultan Hamengkubuwana VI, atau Sultan Behi (Sultan Hanga[Behi]) untuk Sultan Hamengkubuwana VII.

Wilayah Kesultanan Yogyakarta

- Mengikuti kerajaan Mataram, wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu **Nagari Ngayogyakarta** (wilayah ibu kota), **Nagara Agung** (wilayah utama), dan **Manca Nagara** (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000 karya (sekitar 309,864500 km persegi), dan keseluruhan wilayah Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,488675 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo | di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi).

Pembagian Wilayah Kasultanan Yogyakarta

Nagari Ngayogyakarta	Nagara Agung
<ol style="list-style-type: none">1) Kota tua <u>Yogyakarta</u> (di antara <u>Sungai Code</u> dan <u>Sungai Winongo</u>), dan2) Daerah sekitarnya dengan batas <i>Masjid Pathok Negara</i>.	<ol style="list-style-type: none">1) Daerah <i>Siti Ageng Mlaya Kusuma</i> (wilayah Siti Ageng [suatu wilayah di antara <u>Pajang</u> dengan <u>Demak</u>] bagian timur yang tidak jelas batasnya dengan wilayah Kesunanan),2) Daerah <i>Siti Bumijo</i> (wilayah <u>Kedu</u> dari <u>Sungai Progo</u> sampai <u>Gunung Merbabu</u>),3) Daerah <i>Siti Numbak Anyar</i> (wilayah Bagelen antara <u>Sungai Bagawanta</u> dan <u>Sungai Progo</u>),4) Daerah <i>Siti Panekar</i> (wilayah <u>Pajang</u> bagian timur, dari Sungai Samin ke selatan sampai <u>Gunungkidul</u>, ke timur sampai Kaduwang), dan5) Daerah <i>Siti Gadhing Mataram</i> (wilayah Mataram Ngayogyakarta [suatu wilayah di antara <u>Gunung Merapi</u> dengan <u>Samudra Hindia</u>]).

Pembagian Mataram dan Manca Nagara pada tahun 1757

Manca Nagara meliputi:

- 1) Wilayah Madiun yang terdiri dari daerah-daerah:- Madiun Kota-Magetan- Caruban- Sebagian Pacitan;
- 2) Wilayah Kediri yang meliputi daerah-daerah:- Kertosono- Berbek-Godean- Kalangbret- Ngowo;
- 3) Wilayah Surabaya yang meliputi daerah Japan (Mojokerto);
- 4) Wilayah Rembang yang meliputi daerah-daerah:- Jipang (Ngawen) dan-Teras Karas (Ngawen);
- 5) Wilayah Semarang yang meliputi daerah-daerah:- Selo atau Seselo (makam nenek moyang raja Mataram)- Warung (Kuwu-Wirosari)-Sebagian Grobogan.

- Wilayah-wilayah Kesultanan tersebut bukan sebuah wilayah yang utuh, namun terdapat banyak enklave maupun eksklave wilayah Kesunanan dan Mangkunegaran. Wilayah-wilayah tersebut merupakan hasil dari Perjanjian Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti. Perjanjian itu juga disebut Perjanjian Giyanti.
- Dalam perjalanan waktu wilayah tersebut berkurang akibat perampasan oleh Daendels dan Raffles. Setelah Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintah Hindia Belanda akhirnya merampas seluruh wilayah Manca Nagara. Pada tahun itu pula ditandatangani Perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan wilayah dan batas-batas Kesultanan Yogyakarta dengan Kesunanan Surakarta. Wilayah Kesultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di wilayah tersebut terdapat enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen), dan Pakualaman (Kabupaten Kota Pakualaman).

Hukum dan Peradilan Kesultanan Yogyakarta

- Dalam sistem peradilan kerajaan, kekuasaan kehakiman tertinggi berada di tangan Sultan. Dalam kekuasaan kehakiman Kesultanan Yogyakarta, terdapat empat macam badan peradilan, yaitu Pengadilan Pradata, Pengadilan Bale Mangu, Al Mahkamah Al Kabirah, dan Pengadilan Darah Dalem.
- *Pengadilan Pradata* merupakan pengadilan sipil yang menangani masalah pidana maupun perdata.
- *Pengadilan Bale Mangu* merupakan pengadilan khusus yang menangani tata urusan pertanahan dan hubungan antar tingkat antara pegawai kerajaan.
- Al Mahkamah Al Kabirah atau yang sering disebut dengan Pengadilan Surambi adalah pengadilan syar'iyah yang berlandaskan pada Syariat (Hukum) Islam. Pengadilan ini merupakan konsekuensi dari bentuk Pemerintahan Yogyakarta sebagai sebuah Kesultanan Islam. Mulanya pengadilan ini menangani *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga) seperti nikah dan waris, serta jinayah (hukum pidana). Dalam perjalannya kemudian berubah hanya menangani *ahwal al-syakhsiyah* nikah, talak, dan waris.
- *Pengadilan Darah Dalem* atau *Pengadilan Pancaniti* merupakan pengadilan khusus (*Forum Privilegatum*) yang menangani urusan yang melibatkan anggota keluarga kerajaan. Pengadilan ini sebenarnya terdiri dari dua pengadilan yang berbeda yaitu *Pengadilan Karaton Darah Dalem* dan *Pengadilan Kepatihan Darah Dalem*.

- Perubahan bidang kehakiman mendasar terjadi pada 1831 ketika pemerintah Hindia Belanda setahap demi setahap mencampuri dan mengambil alih kekuasaan kehakiman dari pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Mulai dari penunjukkan Residen Kerajaan Hindia Belanda untuk Kesultanan Yogyakarta sebagai ketua Pengadilan Pradata sampai dengan pembentukan pengadilan Gubernemen (*Landraad*) di Yogyakarta.
- Akhirnya Pengadilan Pradata dan Bale Mangu dihapuskan masing-masing pada 1916 dan 1917 serta kewenangannya dilimpahkan pada Landraad Yogyakarta. Setelah Kesultanan Yogyakarta menyatakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sistem peradilan yang digunakan adalah sistem peradilan nasional. Pengadilan yang digunakan adalah Pengadilan Negeri sebagai ganti dari Landraad Yogyakarta. Pada 1947 Pemerintah Pusat Indonesia menghapuskan pengadilan kerajaan yang terakhir, Pengadilan Darah Dalem.

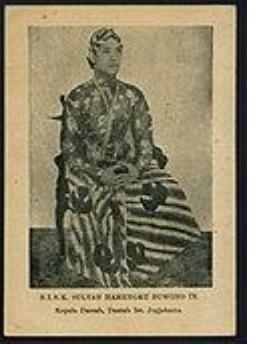
- Dalam sistem hukum kerajaan pernah digunakan sebuah **Kitab Undang-undang Hukum** (KUH) Kesultanan yang disebut dengan nama *Kitab Angger-anger* yang disusun bersama oleh Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta pada 1817. KUH ini terdiri dari lima/enam buku (volume) yaitu *Angger Aru-biru*, *Angger Sadasa*, *Angger Gunung*, *Angger Nawala Pradata Dalem*, *Angger Pradata Akhir* (khusus Yogyakarta), dan *Angger Ageng*. Seiring dengan berdirinya *Landraad Yogyakarta* maka KUH pun diganti dengan KUH Belanda seperti *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Strafrecht*.

Raja-Raja Kesultanan Yogyakarta

Nama	Jangka hidup	Awal memerintah	Akhir memerintah	Keluarga	Gambar
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hamengkubuwana I</u> • <i>Pangeran Mangkubumi</i> • Bendara Raden Mas Sujono 	6 Agustus 1717 – 4 Maret 1792 (umur 74)	1755	1792	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Amangkurat IV</u>, ayah • Mas Ayu Tejawati, ibu 	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hamengkubuwana II</u> • <i>Sultan Sepuh</i> • Gusti Raden Mas Sundoro 	7 Maret 1750 – 3 Januari 1828 (umur 77)	1792	1810	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Hamengkubuwana I</u>, ayah • Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten, ibu 	

<ul style="list-style-type: none"> •<u>Hamengkubuwana III</u> •Gusti Raden Mas Surojo 	<p>20 Februari 1769 – 3 November 1814 (umur 45)</p>	<p>1810</p>	<p>1811</p>	<ul style="list-style-type: none"> •<u>Hamengkubuwana II</u>, ayah •Gusti Kanjeng Ratu Kedhaton, ibu 	
<ul style="list-style-type: none"> •<u>Hamengkubuwana IV</u> •<i>Sinuhun Seda Besiyar</i> •Gusti Raden Mas Ibnu Jarot 	<p>3 April 1804 – 6 Desember 1823 (umur 19)</p>	<p>1814</p>	<p>1822</p>	<ul style="list-style-type: none"> •<u>Hamengkubuwana III</u>, ayah •Gusti Kanjeng Ratu Kencana, ibu 	
<ul style="list-style-type: none"> •<u>Hamengkubuwana V</u> •Gusti Raden Mas Gathot Menol 	<p>24 Januari 1820 – 5 Juni 1855 (umur 35)</p>	<p>1822</p>	<p>1826</p>	<ul style="list-style-type: none"> •<u>Hamengkubuwana IV</u>, ayah •<u>GRM Timur Muhammad</u>, anak 	

<ul style="list-style-type: none"> Hamengkubuwana VI •<i>Sinuhun Mangkubumi</i> •Gusti Raden Mas Mustojo 	<p>10 Agustus 1821 – 20 Juli 1877 (umur 55)</p>	1855	1877	<p>Hamengkubuwana V, abang</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Hamengkubuwana VII •<i>Sultan Sugih</i> •Gusti Raden Mas Murtejo 	<p>4 Februari 1839 – 30 Desember 1931 (umur 92)</p>	1877	1921	<p>Hamengkubuwana VI, ayah</p> <p>•Gusti Kanjeng Ratu Sultan, ibu</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Hamengkubuwana VIII •Gusti Raden Mas Sujadi 	<p>3 Maret 1880 – 22 Oktober 1939 (umur 59)</p>	1921	1939	<p>Hamengkubuwana VII, ayah</p> <p>•Gusti Kanjeng Ratu Hemas, ibu</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <u>amengkubu</u> <u>wana IX</u> <p>Gusti Raden Mas Dorojatun</p>	<p>12 Agustus 1912 – 2 Oktober 1988 (umur 76)</p>	<p>1939</p>	<p>1988</p>		<ul style="list-style-type: none"> <u>Hamengkubu</u> <u>wana VIII</u>, <p>ayah</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkune gara, ibu 	 <p>A black and white portrait of Sultan Hamengkubuwana VIII, seated in a traditional Indonesian chair (Kursi). He is wearing a long, patterned robe (Baju Melayu) and a sash (Sampin). The portrait is framed by a dark border.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <u>Hamengkubu</u> <u>awana</u> <p>XBendara Raden Mas Herjuno Darpito</p>	<p>2 April 1946 (umur 76)</p>	<p>1988</p>	<p>masih menjabat</p>		<ul style="list-style-type: none"> <u>Hamengkubu</u> <u>wana IX</u>, ayah <ul style="list-style-type: none"> Kanjeng Raden Ayu Windyaningrum, ibu 	 <p>A color portrait of Sultan Hamengkubuwana IX, seated. He is wearing a dark, formal court dress (Baju Melayu) with a sash (Sampin) and a traditional headdress (Peci). He is seated behind a low table with some ceremonial objects. The background is a warm, reddish-orange color.</p>

Akhir Masa Kesultanan Yogyakarta

- Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengirim kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu, mewujudkan sebuah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat kerajaan. Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII kemudian menjadi Kepala Daerah Istimewa dan Wakil Kepala Daerah Istimewa dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
- Pada tahun 1950 secara resmi *Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* ini, bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi sebagai bagian Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian status *Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* sebagai sebuah negara (*state*) berakhir dan menjelma menjadi pemerintahan daerah berotonomi khusus. Sedangkan institusi istana kemudian dipisahkan dari "negara" dan diteruskan oleh Keraton Kesultanan Yogyakarta.



TERIMAKASIH